



Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, 2016-2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
TERWUJUDNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	MEMELIHARA KERUKUNAN INTERNAL, DAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA.	MENDORONG SUKSES PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN PELAKSANAAN IBADAH UMAT BERAGAMA DI MINAHASA SELATAN	MENURUNNYA JUMLAH DEMONSTRASI	0	0	SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI BIDANG FASILITAS SOSIAL, KEAGAMAAN DAN URUSAN HAJI.	BAGIAN KESRA SETDA	
		MENINGKATKAN FASILITASI PENYELENGGARAAN DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DI KALANGAN TOKOH AGAMA, PEMUDA,	TERLAKSANANYA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	3 KALI	3 KALI	FASILITASI KERJASAMA LEMBAGA MASYARAKAT	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	



		DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN TERMASUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB);	TERWUJUDNYA PERAN PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN TERHADAP ATURAN HUKUM DAN PERUNDANGAN	MENINGKATKAN BUDAYA HUKUM DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA ADIL, KONSEKUEN, TIDAK DISKRIMINATIF, DAN MEMILIKI PERAN PADA RAKYAT KECIL.	MEMASTIKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN MELALUI OPTIMALISASI SISKAMLING	ANGKA KRIMINALITAS MENURUN	590 KASUS	500 KASUS	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	SATPOL PP	
			RASIO POS SISKAMLING PER JUMLAH DESA/KELURAHAN = 1/177 DESA, KELURAHAN	1/177 DESA, KELURAHAN	2/177 DESA, KELURAHAN			
		MENAMBAH JUMLAH PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI MINAHASA SELATAN	CAKUPAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI MINAHASA SELATAN	2.658	2.658	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	SATPOL PP	



		MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PELANGGARAN K3(KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN) MASYARAKAT MINAHASA SELATAN	PENEGAKKAN PERDA	75%	95,08%	PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS	SATPOL PP	
MENINGKATKAN KERJASAMA TNI, POLRI, KEJAKSAAN, SATPOL PP DENGAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA TRANTIBMAS		MENDORONG KOORDINASI FORKOMPIMDA YANG SOLID, SINKRON DAN TERINTEGRASI	ANGKA KRIMINALITAS MENURUN	590 KASUS	500 KASUS	PENINGKATAN FASILITAS DAN KOORDINASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (EKSEKUTIF,LEGISLATIF) DAN PEJABAT NEGARA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL	BADAN KESBANGPOL	
		MEMBERANTAS TINDAKAN PENEBAANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR, DAN PENAMBANGAN LIAR	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, KEINDAHAN) DI KABUPATEN =	75 %	90 %	PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	SATPOL PP	



		MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA	ANGKA KRIMINALITAS MENURUN	590 KASUS	500 KASUS		BADAN KESBANGPOL	
TERWUJUDNYA INTEGRASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MINAHASA SELATAN SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL, MORAL, DAN ETIKA PEMBANGUNAN.	MENJAGA KEANEKARAGAMAN, KEKAYAAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR MASYARAKAT MINAHASA SELATAN	MEMBANGUN DAN MEREVITALISASI SITUS SENI DAN BUDAYA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN	BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN SEBANYAK 17 SITUS (Kecamatan Amurang Timur Desa Lopana terdapat Sumur Tua Portugis, Kecamatan Suluun Tareran Desa Kapoya ada tiga Waruga, 1 Menhir/Watu Tumotowa dan 8 Goa/Bunker Perlindungan Penduduk Peninggalan Perang, Desa Pinapalangkow batu Menhir/Watu Tomotowa), 3 Goa/Bunker Perlindungan	1 CAGAR BUDAYA	10 CAGAR BUDAYA	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	DINAS PARIWISATA	



			<p>Penduduk Peninggalan Perang, Desa Suluun terdapat 3 batu Menhir/Watu Tumotowa1 Waruga, Kecamatan Tareran Desa Wuwuk Waruga & Watu Tumotowa, Desa Rumoong Atas ada Lonceng Gereja Tua/Buatan Belanda Di GMIM Rumoong Atas, Desa Lansot Waruga, Makam Penginjil Belanda, Kuburan Hukum Tua Pertama, Desa Wiau Lapi batu Menhir/Watu Tumotowa, Desa Tumuluntung 3 situs Watu Tumotowa/ menhir, Desa Kaneyan Waruga, Lesung Batu, Lentuk Batu, Kecamatan Maesaan Desa Tumani, Tumani Barat, Lowian, Kinaweruan terdapat Lumpang Batu & Batu Dakon. Kecamatan Maesaan dan Tompasobaru Desa Pinaesaan Rumah Batu, lesung Batu & Taman Purbakala Watu Tiwa, Desa Bojonegoro Mesjid Tua Bojonegoro, Desa Tumani Makam Belanda, Desa Liandok Lesung Batu, Desa Tumani bakal Lesung Batu dan di Kecamatan Ranoyapo</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			Desa Pontak Lesung Batu, Batu Dakon)					
		MENDORONG PENGEMBANGAN NILAI LUHUR BUDAYA DALAM PENYELENGGARAAN HARI-HARI BESAR KENEGARAAN DAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN	ANGKA KRIMINALITAS MENURUN	590 KASUS	500 KASUS	PENINGKATAN/FASILITASI BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI BUDAYA DAERAH	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN KEWARGAAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK Mendukung REVOLUSI MENTAL	MENANAMKAN NILAI-NILAI BUDAYA LUHUR MELALUI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	ANGKA PARTISIPASI PAUD MENCAPAI 77%	76%	77%	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	MENINGKATKAN PROMOSI, DIPLOMASI DAN PERTUKARAN BUDAYA	MENGEMBANGKAN INSENTIF KHUSUS UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MENGANGKAT KEBUDAYAAN LOKAL	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA MINIMAL 2 KALI	1 KALI	2 KALI	PENINGKATAN/FASILITASI BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI BUDAYA DAERAH	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	MENGEMBANGKAN BUDAYA MAPALUS, SITOU TIMOU TUMOU TOU SEBAGAI	MENDORONG IMPLEMENTASI BUDAYA MAPALUS, SITAU TIMOU TUMOU TOU DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERDESAAN	MENINGKATNYA JUMLAH SARANA PENYELENGGARAAN SENI DAN BUDAYA MENJADI 5 TEMPAT PADA AKHIR 2021	0	5 TEMPAT	PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	



	MODAL SOSIAL		MENURUNNYA JUMLAH KASUS KDRT DARI 201 KASUS MENJADI 110 KASUS	201 KASUS	110 KASUS	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	BP3A	
		PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH MENJADI	25%	40%	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAURUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	BP3A	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF	
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
TERWUJUDNYA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN	MENURUNKAN ANAK PUTUS SEKOLAH	MEMBERIKAN BANTUAN BEASISWA BAGI ANAK KELUARGA MISKIN DAN SISWA BERPRESTASI DI TINGKAT SD DAN SMP	- APM SD/SMP (%) = 97/93	96/93	97/93	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		MENDORONG ANAK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SD, SMP DAN SMA UNTUK MENGIKUTI PAKET A, B DAN C	- APK SD/SMP (%) = 106/99	105/98	106/99	PENDIDIKAN MENENGAH	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			- ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/SMP (%) =	0,10/0,75	0,90/0,68				
	MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	MENINGKATKAN PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SESUAI SPM SD/SMP		108/79	109/80	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1 SD/SMP =		75%/85%	85%/95%			
	MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR SEKOLAH, PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR DAN	SEKOLAH PENDIDIKAN SD/SMP KONDISI BANGUNAN BAIK =		190/65	210/73	MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	



		REHABILITASI FASILITAS PERSEKOLAHAN						
	MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU	MEMBERIKAN INTENSIF, BANTUAN BEASISWA BAGI GURU YANG AKAN MELANJUTKAN KE JENJANG PENDIDIKAN SARJANA	RASIO GURU/MURID PER KELAS RATA-RATA SD/SMP SESUAI SPM =	22,82/12,88	21,06/1206			
	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENDIDIKAN	MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN SUPRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEPERTI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRASARANA PENUNJANG LAINNYA.						
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	MENINGKATKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH MASYARAKAT MINAHASA SELATAN	MEMBERIKAN BANTUAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI SD, SMA DAN MAHASISWA MINAHASA SELATAN YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN	ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH = 11,1 TAHUN	9,3 TAHUN	11,1 TAHUN	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			APM SD = 97% APM SMP = 93%	96/93	97/93			PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING ANAK MELALUI PENDIDIKAN ANAK USIA	MENDORONG KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN	MENINGKATKAN AKSES, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN						



DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL	PENDIDIKAN NON FORMAL	PENDIDIKAN NON FORMAL.						
TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA	MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, TERUTAMA KEPADA PARA IBU, ANAK, REMAJA DAN LANSIA; MENINGKATKAN PELAYANAN GIZI MASYARAKAT YANG BERKUALITAS	MENDORONG KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI SPM	USIA HARAPAN HIDUP = 71 TAHUN	70,96	71	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	DINAS KESEHATAN	
			ANGKA KEMATIAN IBU = RATA-RATA 4 KASUS / TAHUN	6 KASUS	4 KASUS			
			ANGKA KEMATIAN BAYI = RATA-RATA 16 KASUS PER TAHUN	20 KASUS	16 KASUS			
			PERSENTASE BALITA GIZI BURUK (KASUS) = 0 KASUS	3 KASUS	0 KASUS			
			CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI = 90%	71,77%	90%			
			CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN 100%	100%	100%			
			KINJUNGAN IBU HAMIL K4 = 85%	75%	85%			



			CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) = 94%	78%	94%	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN BALITA	DINAS KESEHATAN DAN BPMPD	
			CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF (KHUSUS KESEHATAN IBU) = 100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN DAN BPMPD	
			RASIO POSYANDU AKTIF PER SATUAN BALITA = 100%	100%	100%		DINAS KESEHATAN DAN BPMPD	
TERWUJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN	MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG BERKUALITAS	MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, PUSTU (JUMLAH) = 17	17	17	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN BPMPD	
	MENJAMIN AKSES KESEHATAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN		CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN (JUMLAH) =	28.712	55.000	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	DINAS KESEHATAN DAN BPMPD	
			CAKUPAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK USIA 2 TAHUN KE ATAS PADA ANAK KURANG GIZI = 35 ANAK	45 ANAK	35 ANAK			



			RASIO TENAGA MEDIS PER SATUAN PENDUDUK SESUAI SPM = 3.344	3.279	3.344			
TERSEDINYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETENSI DAN PROFESIONAL DAN	MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PROFESIONALITAS SDM KESEHATAN DI PUSKESMAS-PUSKESMAS	MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DALAM BERBAGAI PELATIHAN DAN SOSIALISASI	CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN= 90%	80%	90%	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
			CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI = 85%	70%	85%			
			CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN = 100%	100%	100%			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT MINAHASA SELATAN YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG	MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN	PENINGKATAN MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN TERMASUK PENATALAKSANAAN KASUS DAN PEMUTUSAN RANTAI PENULARAN;	USIA HARAPAN HIDUP = 71 TAHUN	70,96 TAHUN	71 TAHUN	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	DINAS KESEHATAN	
			CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI = 70%	55%	85%	PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	DINAS KESEHATAN DAN DINAS PU	
			CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT DBD = 100%	100%	100%	PENANGGULANGAN WABAH DAN BENCANA	DINAS KESEHATAN	



			CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT TBC BTA = 100%	65%	85%			
TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN	MENGUPAYA KAN STANDARISA SI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS RAWAT INAP DAN KEPERAWATA N	PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR SESUAI STANDAR MENCAKUP PUSKESMAS (RAWAT INAP/PERAWATAN) DAN JARINGANNYA TERMASUK MENGUPAYAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DI WILAYAH MINAHASA SELATAN	JUMLAH RUMAH SAKIT = 3	3 RUMAH SAKIT	3 RUMAH SAKIT	STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
			PERSENTASE PUSKESMAS YANG BERAKREDITASI = 100%	35%	100%			
			PREVALENSI MEROKOK MENURUN (18 KEBAWAH)	6,4%	5,2%			
			PREVALENSI STUNTING MENURUN	19,5%	18,3%			
			PREVALENSI OBESITAS MENURUN (18 TAHUN KEATAS)	162 KASUS	150 KASUS			
			PREVALENSI HIPERTENSI MENURUN	3.476 KASUS	3.476 KASUS			



TERWUJUDNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN MINAHASA SELATAN YANG BERKUALITAS	MENDORONG KERJASAMA PEMERINTAH , MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA	PENINGKATAN JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENJADI PENYEDIA LAYANAN SESUAI STANDAR ANTARA LAIN MELALUI KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN PENYEDIA LAYANAN SWASTA	JUMLAH RUMAH SAKIT = 3	3 RUMAH SAKIT	3 RUMAH SAKIT	KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
			CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF (KHUSUS KESEHATAN IBU) = 100%	100%	100%			
			RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, PUSTU (JUMLAH) = 17	17	17			
TERBENTUKNYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF SESUAI DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	MENINGKATKAN JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASAR;	MENINGKATKAN KUALITAS, KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA SESUAI PERMINTAAN PASAR	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA = 1.104 PENCARI KERJA			PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, DINAS PERINDAH, DINAS KOPERASI DAN UMKM	
						PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUANGAN KOMPETITIF	DINAS KOPERASI DAN UMKM	
						PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	disperindag	
				0	2 DOKUMEN	PENUNJANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DI MINAHASA SELATAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISARA	



		MEMPERLUAS AKSES INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA	ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	104	1.104	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA, DINAS PERINDAH, DINAS KOPERASI DAN UMKM
	MEMPERKUAT UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN	MENINGKATKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN	ANGKA SENGKETA PENGUSAHA-PEKERJA PER TAHUN MENURUN	1 SENGKETA	0	PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN	DINAS TENAGA KERJA, DINAS PERINDAH, DINAS KOPERASI DAN UMKM
TERJAMINNYA KESETARAAN HAK DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MINAHASA SELATAN	MENINGKATKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATKAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK ANAK TERLANTAR, PARA PENYANDANG CACAT, PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO SERTA EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	JUMLAH PMKS YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL	1.214	214	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	DINAS SOSIAL
			JUMLAH PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL SERTA LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TELAH MENERIMA JAMINAN SOSIAL	1.085	585	PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	DINAS SOSIAL
			JUMLAH SARANA SOSIAL SEPerti PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO DAN	1	4	PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	DINAS SOSIAL



			PANTI REHABILITASI SESUAI SPM			PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	DINAS SOSIAL	
MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN	MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL KEMASYARAKATAN	PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN YANG TERKENA PERISTIWA KEDUKAAN	PERSENTASE WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT YANG MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SEMAKIN MENINGKAT	127	177	PENYELENGGARAAN JAMINAN DAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN	DINAS SOSIAL	
		MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL YANG BERKUALITAS		51	126	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL	DINAS SOSIAL	
TERSALURNYA BANTUAN SOSIAL DENGAN TEPAT SASARAN DAN TEPAT PERUNTUKAN	MEMPERKUAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN	MEMASTIKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENGANGGURAN TEPAT SASARAN	TERSEDIAANYA 1 DOKUMEN UPDATE DATABASE YANG AKURAT SETIAP AKHIR TAHUN PERENCANAAN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	PEMANTAPAN DATABASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	DINAS SOSIAL	



	PENGANGGURAN	MENGINTENSIFKAN PELAKSANAAN PROGRAM ODSK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN	MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN DATA BDT	19.756	11.854	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	
--	---------------------	---	---	---------------	---------------	--	---------------------	--



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
TERWUJUDNYA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	MEMPERKUAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN DPRD	JUMLAH PERDA YANG DITETAPKAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	7	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN	
			PENETAPAN PERDA YANG TEPAT WAKTU SESUAI ATURAN PERUNDANGAN	11	7	PENINGKATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	SETWAN	
		TERSOSIALISASIKAN KEGIATAN DPRD SECARA BERKALA, UPDATE DAN TRANSPARAN	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (JASA KOMUNIKASI)	80 %	100 %	PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI	PENERAPAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TRANSPARAN, KOMPETITIF, DAN BERBASIS MERIT	MENEMPATKAN ASN BERDASARKAN KOMPETENSI DAN PRESTASI	TERSELENGGARANYA PROSES REKRUITMENT PEJABAT BERDASARKAN UU ASN	60 %	100 %	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	BKDD	
		MENDORONG INOVASI DAN KREATIVITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	TERWUJUDNYA INOVASI DAN KREATIFITAS SKPD DALAM PENCAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN			PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	SEMUA SKPD	
				100%	100%	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT, PEMINDAHAN DAN PENSUN	BKDD	
						PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	SEMUA SKPD	



<p>TERWUJUDNYA KONSISTENSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<p>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</p>	<p>MENDORONG TERINTEGRASINYA SISTEM PERENCANAAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK PLANNING, BUDGETING, AUDITING</p>	<p>MEMBAIKNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH MINAHASA SELATAN (LAKIP A)</p>	<p>1 DOKUMEN LAKIP</p>	<p>1 DOKUMEN LAKIP</p>	<p>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<p>BAPPEDA</p>	
		<p>MEMANTAPKAN KUALITAS PERENCANAAN DI TINGKAT SKPD</p>		<p>1 PAKET LAPORAN</p>		<p>PERENCANAAN SKPD</p>	<p>SEMUA SKPD</p>	
		<p>MEMANTAPKAN KUALITAS PERENCANAAN YANG HOLISTIK, TEMATIK DAN SPATIAL</p>	<p>DIRAIHNYA PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT DAN ATAU PEMERINTAH REGIONAL DALAM HAL PERENCANAAN (ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA)</p>	<p>1 PAKET DOKUMEN PERENCANAAN</p>	<p>1 PAKET DOKUMEN PERENCANAAN</p>	<p>PERENCANAAN WILAYAH, PERENCANAAN EKONOMI, DAN PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</p>	<p>BAPPEDA</p>	



			RASIO RUANG TERBUKA HIJAU PER SATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB	0%	30%	PERENCANAAN TATA RUANG	DINAS PU	
			RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN BANGUNAN	512 UNIT	1000 UNIT		DINAS PU	
			RUANG PUBLIK YANG BERUBAH PERUNTUKANNYA	0%	30%		DINAS PU	
	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA	MEMANTAPKAN KOORDINASI PENGAWASAN AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DAN APIP	JUMLAH LHP YANG DITINDAKLANJUTI (RATIO)	100 %	100%	PENINGKATAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	INSPEKTORAT	
			BEBAS TEMUAN APIP	80 %	100 %	PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS	INSPEKTORAT	
	TERSELENGGAR ANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING	MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIJINAN	MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ASN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	LAMA/RENTANG WAKTU PROSES PERIJINAN	4 HARI	3 HARI	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	KPPTSP
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, SERTA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI		PENINGKATAN CAKUPAN REGISTRASI VITAL DAN PENGEMBANGAN REGISTRASI VITAL TERPADU;	PENDUDUK BERKTP PER SATUAN PENDUDUK			PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN	20.852	25.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	



	KEPENDUDUKAN TERSEBUT UNTUK PERENCANAAN DAN EVALUASI HASIL-HASIL PEMBANGUNAN.		RASIO PASANGAN BERAKTE NIKAH	4.170	5.200		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	MENDORONG PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH	PERTUMBUHAN PAD 15% PER TAHUN	15%	15%	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	DPKPA		
		MENJAMIN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PENYELENGGARAAN LPSE YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	100 %	100 %	PENGUATAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	LPSE		
	PENINGKATAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	MENINGKATKAN KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	MINAHASA SELATAN MERAH OPINI WTP		110.809.000	612.289.673	PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	DPKPA	
					75%	100%	EVALUASI, KOORDINASI, PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	DPKPA	
					100%	100%	PENINGKATAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BADAN MILIK DAERAH SKPD	DPKPA	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG MANDIRI	MENDORONG PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA	MENDORONG PENGELOLAAN DANA DESA YANG SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90%	100%	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	BPMPD	
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA.	MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN KREATIFITAS PEMERINTAH DESA	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS BAGI APARATUR DESA SECARA BERKALA DALAM RANGKA UPDATE PENGETAHUAN DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	95%	100%	PEMANFAATAN DANA DESA YANG TAPAT SASARAN DAN TEPAT WAKTU	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	BPMPD	
			95%	100%	PENINGKATAN PENERIMAAN DANA APB DESA	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	BPMPD	



TERWUJUDNYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK BERBASIS KEUNGGULAN SETIAP WILAYAH	MEMBANGUN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN MINAHASA SELATAN	MEMPERBAIKI, MEREHABILITASI DAN MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN	1 KAWASAN	2 KAWASAN	TERBANGUNNYA KAWASAN AGROPOLITAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
<p>MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PETANI MISKIN, USAHA PERIKANAN TANGKAP MAUPUN BUDI DAYA, DAN USAHA SKALA MIKRO LAINNYA YANG MENUNJANG RANTAI PRODUKSI USAHA KECIL YANG MENJADI POTENSI DI WILAYAH WILAYAH MINAHASA SELATAN</p>	<p>MENINGKATKAN AKSES PERMODALAN, KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</p>	<p>MEMBERDAYAKAN PETANI DAN NELAYAN MELALUI PEMBERIAN AKSES PERMODALAN DAN TRANSFER IPTEK</p>	38.235,68/7 5.545,3 TON	43.367,5/8 7.884 TON	PRODUKSI BERAS 43.367,5 TON DAN JAGUNG 87.884 TON	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			101,17	104,4	NTP PETANI/PEKEBUN = 104,4	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			38.235,68/7 5.545,3 TON	43.367,5/8 7.884 TON	PRODUKSI BERAS 43.367,5 TON DAN JAGUNG 87.884 TON	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			505.880 KG	563.500 KG	PRODUKSI DAGING AYAM = 551.409 KG	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			101,17	104,4	NTP PETANI/PEKEBUN = 104,4	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			11.067,7 TON	20.000 TON	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			318,1 TON	10.000 TON	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	



MEMBANGUN AGROINDUSTRI YANG BERDAYA SAING DENGAN MEMANTAPKAN SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT AGROINDUSTRI MINAHASA SELATAN YANG BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DNA KELAUTAN	MENINGKATKAN KAPASITAS PETANI/PEKEBUN DAN NELAYAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA BERORIENTASI EKSPORT	5,326/3,943 TON/HA	5,440/4,020 TON/HA	PRODUKTIFITAS PADI/JAGUNG DIATAS RATA-RATA KABUPATEN SE SULAWESI UTARA	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			1,15 KG	1,17 KG	PRODUKTIFITAS TERNAK AYAM	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
			101	102	NTP NELAYAN = 102	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			101,17	104,4	NTP PETANI/PEKEBUN = 104,4	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN /DINAS PERKEBUNAN	
		MENINGKATKAN KAPASITAS KOPERASI, UMKM, INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM PENGELOLAAN USAHA BERORIENTASI EKSPORT	64.237,2 TON	100.000 TON	PERKEMBANGAN EKSPOR DAERAH MINAHASA SELATAN MENINGKAT	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPORT		
						PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		
						PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI		



						PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUANGAN KOMPETITIF		
						PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEPALA DAERAH	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENINGKATAN POTENSI DAN AKSES PARIWISATA MINAHASA SELATAN YANG BERDAYA SAING	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PARIWISATA	MENDORONG TERBENTUKNYA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DI MINAHASA SELATAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	48.000	100.000	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA	MENDORONG KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN EVENT PARIWISATA (SENI DAN BUDAYA)	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	48.000	100.000	PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		MEMANTAPKAN SDM PARIWISATA MINAHASA SELATAN YANG BERWAWASAN GLOBAL DAN BERDAYA SAING					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		MENINGKATKAN PERAN DAN KONTRIBUSI KAB. MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI BUDAYA DI TMII					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	



	MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	PENYUSUNAN KALENDER PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA LAINNYA DI SULAWESI UTARA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	48.000	100.000	PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	MENDORONG TERWUJUDNYA KERJASAMA PEMBANGUNAN PARIWISATA DENGAN PIHAK SWASTA	MENINGKATKAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN PARIWISATA DENGAN STAKEHOLDER PARIWISATA	JUMLAH GRUP SENI DAN KETERSEDIAAN SARANA KESENIAN	64 GRUP SENI	75 GRUP SENI	PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
JUMLAH HOTEL, PENGINAPAN, RESTORAN			9/9	12/15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
TERPELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MINAHASA SELATAN	MENJAMIN KESESUAIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	MEMASTIKAN PENYUSUNAN KLHS DALAM SETIAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN	MENURUNNYA AREAL KAWASAN LAHAN KRITIS	45%	20%	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	DINAS KEHUTANAN	
		MEMASTIKAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA DALAM PEMBANGUNAN	CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.	65%	85%	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	KANTOR LH	
		MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP SUMBERDAYA ALAM YANG TERCEMAR, RUSAK DAN DALAM KONSII KRITIS	CAKUPAN PENGHIJAUAN WILAYAH RAWAN LONGSOR DAN SUMBER MATA AIR	40%	65%	PENGENDALIAN PNCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	KANTOR LH, DINAS KEHUTANAN	
			PENCEMARAN STATUS MUTU AIR	35,4%	66,5%			



			TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) PER SATUAN PENDUDUK	7	15			
			PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	2 KALI	0	PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	DINAS KEHUTANAN	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TARGET KINERJA KEPALA DAERAH	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF			
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR						
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRESTASI PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG	MEMPERKUAT KOORDINASI PEMBANGUNAN ANTAR STAKEHOLDER PEMBANGUNAN	MENDORONG MOTIVASI ASN DAN PELAKU PEMBANGUNAN DALAM MENGAWAL PROSES, TAHAPAN DAN KINERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SECARA BERKALA	MERAHAI PRESTASI TERBAIK DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, KETAHANAN PANGAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, LINGKUNGAN HIDUP, INVESTASI DAN EKONOMI DAERAH (ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA, OVERNMENT AWARDS, ADIPURA, WTP, PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN-KEHUTANAN)	1 PAKET DOKUMEN PERENCANAAN	1 PAKET DOKUMEN PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA				
				1 LUMBUNG PANGAN, 2 TON BERAS	3 LUMBUNG PANGAN, 7 TON BERAS	PROGRAM KETAHANAN PANGAN					
						PROGRAM PENDIDIKAN DASAR					
				20 DESA/KELURAHAN	50 DESA	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
		MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI MINAHASA SELATAN			PERTUMBUHAN EKONOMI, PDRB PER KAPITA, IPM, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN	1 PAKET DOKUMEN EKONOMI MAKRO	1 PAKET DOKUMEN EKONOMI MAKRO	PENINGKATAN KINERJA EKONOMI MAKRO DAERAH, SERTA INVESTASI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH	KANTOR PENANAMAN MODAL		
						JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	11/3	11/3	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL DI DAERAH	KANTOR PENANAMAN MODAL	
						JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA) :	1.964.541.611.000	1.964.541.611.000	PENYELENGGARAAN KERJASAMA INVESTASI DAERAH	KANTOR PENANAMAN MODAL	
							100%	100%	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	KANTOR PENANAMAN MODAL	



SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PRIORITAS	SKPD PELAKSANA	PAGU INDIKATIF
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS SECARA MERATA DAN ADIL	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS	MENDORONG KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKUKAN SECARA HOLISTIK DAN SPATIAL TERMASUK PERCEPATAN PROSES LELANG MELALUI LPSE	PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK (40KM/JAM)	44.5%	55.5%	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM		
				272.39 KM	572.39 KM	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		
				272.39 KM	522.39 KM	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN		
				44 BH	54 BH	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JEMBATAN		
			RASIO JARINGAN IRIGASI	54,74%	57,79%	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGANG IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		
PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	60,98	70,49	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN					



			RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) PER SATUAN PENDUDUK	15%	100%	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		
			RASIO TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PER SATUAN PENDUDUK	17 KEC : 204.464 JIWA	100%	PROGRAM KELEMBAGAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN		
		PERSIAPAN PEMBANGUNAN REL KERETA API DI KAB. MINAHASA SELATAN	TERSEDINYA DOKUMEN MASTERPLAN TRANSPORTASI KERETA API KAB. MINAHASA SELATAN	0	3 DOKUMEN	PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	DINAS PU	
TERWUJUDNYA AKSESIBILITAS YANG MENGHUBUNGAN IBUKOTA KECAMATAN DENGAN PUSAT PERTUMBUHAN MELALUI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, SEPERTI:	MENINGKATKAN AKSES TRANSPORTASI MASYARAKAT PERDESAAN	MEMBANGUN AKSES TRANSPORTASI ANTAR DESA YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MINAHASA SELATAN	1 PROYEK	1 PROYEK	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	DISHUB KOMINFO	



PENINGKATAN AKSES JALAN, JEMBATAN, SERTA PELABUHAN	PERCEPATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN	MEMBANGUN WAJAH MINAHASA SELATAN DI PINTU MASUK KABUPATEN	TERSEDIA NYA GERBANG MINAHASA SELATAN TERMASUK RESTING AREA DAN KETERSEDIAAN INFORMASI PEMBANGUNAN MINSER YANG REPRESENTATIF DI PINTU MASUK KABUPATEN			PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	DISHUB KOMINFO	
---	---	--	--	--	--	---------------------------------------	-----------------------	--